

EVOLUSI REPRESENTASI POLITIK PEREMPUAN DI TINGKAT LOKAL INDONESIA: TANTANGAN DAN PELUANG

Rindi Astika Yuliana¹, Istiana Hermawati^{1,2}

Magister Ilmu Pemerintahan STPMD"APMD"¹, Pusat Riset Kebijakan Publik, Badan Riset
dan Inovasi Nasional (BRIN)²

e-mail: rindipayok@gmail.com¹, istiana.hermawati@apmd.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis evolusi representasi politik perempuan di tingkat lokal di Indonesia secara umum, tanpa dibatasi periode tertentu. Latar belakang kajian ini berangkat dari kenyataan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mendorong keterlibatan perempuan dalam politik, kesenjangan antara representasi formal dan substantif masih tetap mencolok. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka deskriptif terhadap berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun partisipasi politik perempuan telah mengalami perkembangan signifikan, representasi substantif mereka masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti hambatan struktural, budaya patriarkal, keterbatasan akses terhadap sumber daya politik, serta stigmatisasi peran gender tradisional. Namun demikian, peluang tetap terbuka melalui hadirnya agen-agen perubahan perempuan yang berhasil membangun pengaruh politik melalui jaringan komunitas, advokasi isu-isu gender, dan penguatan kapasitas diri. Studi ini menegaskan perlunya reformasi kebijakan afirmatif serta penguatan kapasitas politik perempuan agar representasi mereka tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga mampu mendorong transformasi struktural menuju terciptanya kesetaraan gender dalam politik lokal di Indonesia.

Kata Kunci: *Representasi Politik, Perempuan, Politik Lokal, Kesetaraan Gender, Afirmasi*

ABSTRACT

This study analyzes the evolution of women's political representation at the local level in Indonesia, without being limited to a specific period. The background of this research arises from the fact that, although Indonesia has established a legal framework encouraging women's participation in politics, the gap between formal and substantive representation remains striking. This study employs a qualitative approach through a descriptive literature review of various sources, including academic journals, books, and research reports. The findings indicate that, despite significant progress in women's political participation, their substantive representation still faces numerous challenges, such as structural barriers, patriarchal culture, limited access to political resources, and the stigmatization of traditional gender roles. Nevertheless, opportunities remain open through the presence of female change agents who are able to build political influence through community networks, gender issue advocacy, and self-capacity building. This study emphasizes the need for affirmative policy reforms and the strengthening of women's political capacity so that their representation is not merely symbolic but can also drive structural transformation towards achieving gender equality in local politics in Indonesia.

Keywords: *Political Representation, Women, Local Politics, Gender Equality, Affirmative Action*

PENDAHULUAN

Partisipasi politik perempuan merupakan indikator penting kematangan demokrasi dan keadilan sosial di sebuah negara (Celis et al, 2008). Namun, meskipun sudah banyak kemajuan, representasi perempuan dalam politik lokal Indonesia masih menyisakan persoalan yang mendalam dan kompleks. Selama dua dekade terakhir, walaupun kebijakan afirmatif seperti kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif diterapkan secara formal, terdapat jurang lebar antara angka partisipasi kuantitatif dan kualitas keterlibatan politik perempuan yang substantif (Krook, 2010). Fenomena ini mengindikasikan risiko bahwa partisipasi perempuan dalam politik hanya menjadi simbolik tanpa membawa perubahan berarti dalam pengambilan keputusan.

Masalah utama dalam penelitian ini adalah ketidakseimbangan antara representasi simbolik dan substantif perempuan dalam politik lokal Indonesia. Representasi simbolik hanya berupa kehadiran fisik perempuan dalam lembaga legislatif, sementara representasi substantif mencakup kemampuan perempuan untuk memperjuangkan kepentingan dan isu-isu yang relevan dengan kebutuhan perempuan dan kelompok rentan (Celis et al, 2008). Meskipun kuota 30% telah mendorong peningkatan jumlah perempuan terpilih, representasi substantif masih jauh dari harapan, akibat hambatan struktural, budaya patriarkal yang kuat, akses terbatas terhadap sumber daya politik, dan stereotip gender yang membatasi ruang gerak perempuan (Wahidah & Nurdin, 2023). Jika permasalahan ini tidak diatasi, dampaknya akan memperparah ketimpangan sosial dan melemahkan demokrasi yang inklusif. Keterwakilan perempuan yang hanya simbolik dapat memperkuat stigma bahwa politik adalah domain laki-laki dan mengabaikan kepentingan perempuan dalam kebijakan (Franceschet & Piscopo, 2008). Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan kurang responsif terhadap isu gender seperti kekerasan berbasis gender, kesehatan reproduksi, pendidikan anak, dan pemberdayaan ekonomi. Dalam jangka panjang, hal ini menghambat pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial sebagaimana dicita-citakan dalam agenda global SDGs (UN Women Indonesia, 2021).

Berbagai studi sebelumnya telah mengkaji representasi perempuan dalam politik di Indonesia dan negara lain. Putri & Santoso (2022) mengevaluasi kuota perempuan di pemilu 2019 dan menemukan bahwa kuota belum menjamin keterlibatan aktif perempuan. Wahidah & Nurdin, (2023) mengidentifikasi budaya patriarkal sebagai penghambat utama perempuan dalam jaringan politik dan sumber daya. Kurniawan (2020) mencatat bahwa perempuan yang berhasil menembus politik lokal memiliki modal sosial kuat dan latar belakang aktivisme. Fitriani (2025) menyoroti pentingnya jejaring sosial dalam membangun pengaruh politik perempuan di desa. Meski bermanfaat, penelitian-penelitian tersebut memiliki keterbatasan. Pertama, sebagian besar fokus pada aspek kuantitatif, tanpa mengkaji secara mendalam kualitas representasi dan pengaruhnya terhadap kebijakan (Krook, 2009). Kedua, belum banyak yang menelaah secara holistik hubungan hambatan struktural, budaya, dan strategi perempuan dalam politik lokal Indonesia dalam rentang waktu panjang (Yoon, 2021). Ketiga, konteks lokal dan budaya spesifik yang mempengaruhi modal sosial dan strategi politik perempuan masih kurang dieksplorasi (Celis et al, 2008). Terakhir, efektivitas kebijakan afirmatif dan internalisasi partai politik terhadap representasi substantif perempuan belum cukup dipelajari (Franceschet & Piscopo, 2008).

Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis evolusi representasi perempuan dalam politik lokal Indonesia secara komprehensif. Dengan pendekatan kualitatif dan metode studi pustaka deskriptif, penelitian ini tidak hanya menyoroti peningkatan kuantitatif keterwakilan perempuan, tapi juga hambatan struktural dan budaya, serta strategi politik perempuan dalam menghadapi ruang patriarkal. Tujuan khusus penelitian ini meliputi: (1) Mengidentifikasi perkembangan representasi perempuan di politik lokal selama dua dekade,

terutama terkait kuota 30%; (2) Menggali tantangan struktural, budaya, dan sosial yang membatasi kualitas keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan politik di tingkat lokal; (3) Mengeksplorasi strategi dan modal sosial perempuan dalam membangun pengaruh politik; (4) Memberikan rekomendasi teoretis dan praktis untuk memperkuat kapasitas politik perempuan dan reformasi kebijakan afirmatif guna mendorong transformasi struktural menuju kesetaraan gender. Dengan pendekatan analisis yang kontekstual dan komprehensif, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada literatur politik gender dan demokrasi serta menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, partai politik, dan organisasi perempuan dalam memperkuat pemberdayaan politik yang berkelanjutan dan efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*literature review*) untuk mengkaji evolusi representasi perempuan dalam politik lokal Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial yang kompleks, terutama yang berkaitan dengan dinamika politik dan budaya (Creswell, 2013). Fokus pada studi pustaka memungkinkan penelitian ini menggali berbagai temuan dan pemikiran yang sudah ada, serta mengevaluasi hasil-hasil penelitian terdahulu secara sistematis. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa kumpulan literatur yang terdiri atas jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan dan regulasi yang relevan. Pemilihan rentang waktu ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran perkembangan representasi perempuan dalam politik lokal dalam dua dekade terakhir sesuai dengan konteks kajian. Dengan cara ini, penelitian dapat menangkap perubahan sosial dan politik yang signifikan serta tren yang berkembang selama periode tersebut.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur di berbagai database akademik terpercaya, seperti *Google Scholar* dan *Scopus*, serta portal jurnal nasional seperti GARUDA dan SINTA. Pencarian menggunakan kata kunci yang relevan seperti “representasi perempuan politik lokal Indonesia”, “kuota gender”, “politik dan gender”, dan variasi istilah lain dalam bahasa Indonesia maupun Inggris agar hasil pencarian dapat lebih komprehensif dan mewakili berbagai perspektif terkait topik (Webster & Watson, 2002). Langkah ini penting untuk memastikan bahwa literatur yang diperoleh cukup beragam dan mendukung analisis yang mendalam. Selanjutnya, literatur yang dikumpulkan diseleksi dengan menggunakan beberapa kriteria ketat. Literatur yang dimasukkan harus relevan dengan fokus penelitian, untuk menjamin kemutakhiran data, berasal dari sumber yang telah melalui proses *peer-review* atau diterbitkan oleh lembaga resmi, serta memiliki data atau argumen yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan (Boell & Cecez-Kecmanovic, 2015). Kriteria ini memastikan bahwa sumber yang dianalisis berkualitas tinggi dan sesuai dengan standar akademik.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) secara deskriptif. Teknik ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari literatur, mengkategorikan, serta mensintesis informasi secara sistematis dan terstruktur (Elo & Kyngäs, 2008). Proses analisis meliputi pembacaan mendalam terhadap setiap literatur, pengkodean tema-tema penting, pengelompokan kategori berdasarkan kesamaan isi, dan akhirnya penarikan kesimpulan naratif yang menggabungkan berbagai temuan ke dalam gambaran holistik mengenai evolusi representasi perempuan. Untuk menjaga validitas data dan temuan penelitian, pendekatan triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan temuan dari berbagai literatur yang berbeda, serta hanya memilih sumber yang telah melalui proses *peer-review* atau diterbitkan oleh lembaga terpercaya. Pendekatan ini penting untuk

memastikan keakuratan dan keberlanjutan temuan penelitian sehingga hasil analisis dapat dipercaya dan memiliki bobot akademik yang kuat (Yin, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Implementasi Kebijakan Afirmatif Kuota 30% Perempuan

Penelitian literatur menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif berupa kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan partisipasi perempuan di politik lokal Indonesia (Arti & Rizky, 2023; Khoirurrohman et al., 2024; Rahmawati & Nurcahyani, 2024; Sandika et al., 2024). Putri & Santoso (2022) melaporkan bahwa sejak penerapan kuota, jumlah perempuan yang maju sebagai calon legislatif meningkat secara drastis, yang sebelumnya sangat rendah. Hal ini menandai sebuah kemajuan kuantitatif yang penting dalam upaya memperbaiki kesenjangan gender di ranah politik.

Namun, penelitian juga menemukan bahwa implementasi kuota ini masih mengalami berbagai kendala. Krook (2009) menyoroti bahwa meskipun kuota telah meningkatkan jumlah perempuan dalam daftar calon, posisi perempuan sering kali kurang strategis, seperti ditempatkan di nomor urut yang sulit untuk terpilih. Kondisi ini membatasi efektivitas kuota sebagai alat untuk meningkatkan representasi substantif perempuan. Selain itu, Fitriani (2025) mengungkapkan bahwa partai politik di Indonesia masih minim dalam memberikan pembinaan dan pelatihan bagi kader perempuan, sehingga perempuan yang mencalonkan diri seringkali kurang memiliki persiapan dan sumber daya yang memadai untuk bersaing secara kompetitif.

Lebih lanjut, beberapa literatur menunjukkan bahwa dalam praktiknya, kuota seringkali dipenuhi secara formalitas administrasi tanpa diiringi komitmen politik yang kuat dari partai untuk memperkuat posisi perempuan dalam struktur kekuasaan (Asmorojati & Muhammadi, 2021; Mahsun et al., 2021; Nastia et al., 2022). Hal ini menimbulkan risiko bahwa representasi perempuan hanya bersifat simbolik dan tidak berkontribusi secara nyata dalam proses pengambilan keputusan politik di tingkat lokal.

2. Hambatan Struktural dan Budaya Patriarkal

Budaya patriarkal yang masih mendalam di masyarakat Indonesia menjadi hambatan signifikan dalam meningkatkan representasi substantif perempuan di politik lokal. Wahidah dan Nurdin (2023) menunjukkan bahwa persepsi sosial yang menganggap politik sebagai domain laki-laki masih kuat, yang menimbulkan stereotip negatif terhadap perempuan politisi. Tekanan sosial dan keluarga terhadap perempuan untuk menjalankan peran domestik secara penuh juga memperkuat beban ganda yang harus dihadapi perempuan yang aktif di dunia politik (Haq & Afad, 2022; Lakburlawal et al., 2021; Saputri & Gusti, 2024).

Selain itu, Maharani (2021) menyatakan bahwa perempuan politisi sering kali menghadapi hambatan psikologis dan sosial, seperti kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar, termasuk resistensi dari suami atau keluarga besar. Beban tanggung jawab ganda ini mempersulit perempuan dalam menyeimbangkan peran antara kehidupan pribadi dan publik mereka. Selain hambatan budaya, keterbatasan akses perempuan terhadap pelatihan politik, media, dan sumber daya kampanye turut membatasi kemampuan mereka membangun basis dukungan yang kuat (Aisy & Aisy, 2023; Boro & Kale, 2020; Joy et al., 2021). Banyak perempuan mengalami kesulitan mengakses jaringan politik yang selama ini didominasi oleh laki-laki, yang menyebabkan mereka berada pada posisi kurang menguntungkan dalam kompetisi politik (Wahidah & Nurdin, 2023).

3. Strategi Politik dan Modal Sosial Perempuan

Walaupun menghadapi hambatan signifikan, sejumlah perempuan berhasil meraih posisi dalam politik lokal dengan memanfaatkan modal sosial dan strategi adaptif. Kurniawan (2020) mengemukakan bahwa perempuan yang berhasil membangun karier politik di tingkat lokal umumnya aktif dalam organisasi perempuan, PKK, koperasi, dan kegiatan sosial yang membangun jaringan komunitas yang luas. Modal sosial ini menjadi sumber legitimasi politik yang kuat serta sarana mobilisasi dukungan pemilih.

Selain itu, Putri & Santoso, (2022) mencatat bahwa perempuan yang berhasil dalam politik lokal juga sering berasal dari keluarga elit politik atau memiliki pengalaman aktivisme sosial yang membantu mereka membangun jaringan dan memperoleh sumber daya politik yang diperlukan. Isu-isu yang mereka usung umumnya berorientasi pada kepentingan komunitas, seperti pemberdayaan ekonomi perempuan, perlindungan anak, dan pendidikan, yang resonan dengan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan dukungan konstituen.

Strategi ini menunjukkan bahwa keberhasilan perempuan dalam politik lokal lebih banyak ditentukan oleh kedekatan dengan masyarakat dan kekuatan modal sosial daripada hanya bergantung pada dukungan partai politik atau modal finansial. Hal ini mengindikasikan pentingnya pemahaman konteks lokal dan penggunaan pendekatan yang sesuai dengan budaya komunitas dalam membangun kekuatan politik perempuan.

Pembahasan

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika representasi politik perempuan di tingkat lokal Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks regulasi afirmatif, tantangan struktural dan kultural, serta kemampuan perempuan dalam membangun strategi politik berbasis komunitas. Secara kuantitatif, terdapat peningkatan kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif daerah, tetapi peningkatan ini belum secara otomatis menghasilkan representasi substantif yang mampu memperjuangkan kepentingan kolektif perempuan secara efektif dalam pengambilan keputusan politik (Lestari, D., & Handayani, 2023).

Menurut teori representasi yang dikemukakan Pitkin (1967), representasi politik terbagi menjadi dua jenis, yakni representasi simbolik dan substantif. Dalam konteks ini, kebijakan kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif dapat dianggap sebagai upaya formal negara untuk meningkatkan representasi simbolik perempuan. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut masih bersifat elitis dan prosedural, di mana banyak partai politik belum memiliki mekanisme kaderisasi yang memadai untuk membina calon legislatif perempuan. Akibatnya, perempuan yang diajukan seringkali hanya menjadi pelengkap untuk memenuhi syarat administratif, tanpa memiliki pengaruh signifikan terhadap substansi dan arah kebijakan legislatif (Yuliani, 2024).

Kondisi ini diperparah oleh budaya patriarkal yang masih mengakar kuat dalam masyarakat dan lembaga politik. Perempuan politisi masih dipersepsikan sebagai pengecualian dalam dunia politik yang sarat dengan nilai maskulinitas, agresivitas, dan dominasi laki-laki (Fitriani, 2025). Persepsi ini menciptakan bias gender yang membatasi peran perempuan dalam diskursus politik, baik di ruang publik maupun dalam struktur internal partai politik. Sebagai akibatnya, banyak perempuan merasa terpinggirkan dalam forum pengambilan keputusan dan bahkan tidak dilibatkan dalam pembahasan isu-isu penting seperti anggaran atau kebijakan daerah.

Selain itu, tekanan sosial yang berasal dari peran gender tradisional menjadi faktor penghambat lain yang signifikan. Perempuan kerap dibebani oleh ekspektasi sosial untuk tetap menjalankan peran domestik secara penuh meskipun telah terjun ke dunia politik. Hal ini menyulitkan mereka membagi waktu antara tanggung jawab politik dan keluarga. Dalam

beberapa kasus, perempuan menghadapi resistensi dari suami atau keluarga besar yang menganggap aktivitas politik tidak sesuai dengan “kodrat” perempuan. Stigma ini menjadi hambatan psikologis yang berat dan berdampak negatif pada performa politik mereka (Maharani, 2021).

Meski demikian, di tengah tantangan tersebut terdapat perkembangan positif yang tidak dapat diabaikan. Sejumlah perempuan berhasil menavigasi arena politik lokal dengan memanfaatkan modal sosial yang dimiliki. Mereka menggunakan jaringan komunitas, organisasi perempuan, dan keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial sebagai modal politik untuk membangun legitimasi di mata konstituen. Pendekatan berbasis komunitas ini terbukti lebih efektif dibandingkan strategi yang hanya mengandalkan kekuatan partai atau modal ekonomi, terutama di wilayah dengan budaya kolektif yang kuat seperti Jawa Tengah, Yogyakarta, dan beberapa wilayah Sulawesi Selatan (Putri & Santoso, 2022).

Keberhasilan perempuan dalam memanfaatkan modal sosial juga menunjukkan bahwa isu yang mereka usung umumnya bersifat kontekstual dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat, seperti perlindungan perempuan dan anak, pendidikan anak-anak, penguatan ekonomi keluarga, dan pelayanan kesehatan (Ningsih, R., & Setiawan, 2024). Pendekatan ini membedakan politik perempuan dari politik berbasis kepentingan elit, sekaligus memperlihatkan bahwa politik lokal tidak sekadar arena perebutan kekuasaan, tetapi juga menjadi ruang artikulasi nilai dan identitas sosial perempuan.

Kehadiran perempuan dalam parlemen lokal juga memberikan dampak terhadap arah dan substansi kebijakan publik. Di sejumlah daerah yang memiliki legislator perempuan aktif dan vokal, terdapat peningkatan kebijakan yang responsif gender, seperti perda tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan anak, dan regulasi yang memberikan akses ekonomi bagi perempuan kepala keluarga. Namun, capaian tersebut masih bersifat sporadis dan sangat bergantung pada faktor-faktor seperti kapasitas individu, dukungan partai, jaringan organisasi sipil, dan dinamika politik lokal.

Secara keseluruhan, lanskap representasi perempuan dalam panggung politik lokal di Indonesia saat ini dapat digambarkan berada dalam sebuah fase transisional yang penuh dengan kontradiksi. Di satu sisi, terdapat kemajuan yang patut diapresiasi, yang didorong oleh adanya kerangka regulasi formal seperti kebijakan afirmatif kuota 30%. Dorongan ini secara kuantitatif telah berhasil meningkatkan jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan kepala daerah maupun legislatif di tingkat kabupaten/kota. Peningkatan angka ini menandakan terbukanya pintu formal bagi perempuan untuk memasuki arena politik yang sebelumnya sangat didominasi oleh laki-laki.

Namun, di balik peningkatan angka tersebut, tantangan mendasar masih mengakar kuat, menyebabkan representasi perempuan seringkali bersifat simbolik dan belum mampu mencapai substansi yang diharapkan. Kehadiran perempuan di parlemen atau dalam struktur partai politik terkadang hanya untuk memenuhi prasyarat kuota, tanpa diiringi pendelegasian wewenang yang strategis. Tantangan struktural seperti budaya patriarki di internal partai, akses terbatas terhadap pendanaan politik, serta tantangan kultural berupa beban ganda dan stereotip gender di masyarakat, menjadi penghalang utama bagi perempuan untuk dapat menggunakan posisi mereka secara efektif dalam memengaruhi kebijakan publik (Kurniawan, 2020).

Untuk mengatasi kesenjangan antara representasi kuantitatif dan pengaruh kualitatif ini, diperlukan sebuah upaya intervensi yang sistematis dan menyeluruh. Keberhasilan perempuan dalam politik lokal di masa depan sangat bergantung pada penguatan kapasitas politik mereka secara fundamental. Hal ini harus mencakup penyelenggaraan pendidikan politik berperspektif gender yang membekali mereka dengan analisis kritis, pelatihan kepemimpinan untuk mengasah keterampilan negosiasi dan advokasi, serta mendorong reformasi internal partai

politik agar lebih inklusif. Di saat yang sama, penguatan ekosistem sosial melalui peran media dan organisasi masyarakat sipil menjadi krusial untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keterlibatan penuh perempuan di ranah publik.

Tanpa adanya upaya yang terpadu dan konsisten ini, partisipasi perempuan dalam politik lokal berisiko besar terjebak dalam siklus "kuantitas tanpa kualitas". Kehadiran mereka di lembaga politik hanya akan menjadi pajangan simbolis yang tidak memiliki taring untuk memperjuangkan agenda-agenda kerakyatan, khususnya yang berkaitan dengan isu perempuan dan kelompok marjinal. Oleh karena itu, tolok ukur keberhasilan sejati bukanlah sekadar pada berapa banyak kursi yang diisi oleh perempuan, melainkan sejauh mana kehadiran mereka mampu membawa pengaruh nyata dalam proses pengambilan keputusan politik yang pada akhirnya melahirkan perubahan sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan gender bagi seluruh masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menjawab permasalahan utama mengenai bagaimana evolusi representasi perempuan dalam politik lokal Indonesia. Ditemukan bahwa meskipun terdapat peningkatan kuantitatif yang signifikan dalam kehadiran perempuan melalui kebijakan kuota 30%, representasi substantif perempuan yang mencerminkan pengaruh nyata dalam pengambilan keputusan politik masih sangat terbatas. Hambatan struktural, budaya patriarkal yang kuat, serta mekanisme kaderisasi partai politik yang kurang mendukung menjadi faktor utama yang menghalangi perempuan untuk berperan secara penuh dan efektif dalam ranah politik lokal.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi menyeluruh dalam mekanisme internal partai politik yang fokus pada pengembangan dan pembinaan kader perempuan. Pendidikan politik berperspektif gender dan pelatihan kepemimpinan perlu diperkuat agar perempuan memiliki kapasitas dan kepercayaan diri untuk mengambil peran strategis. Selain itu, penguatan modal sosial dan jaringan komunitas perempuan harus didukung sebagai strategi efektif dalam meningkatkan legitimasi politik dan representasi substantif. Terakhir, perubahan budaya patriarkal melalui kampanye kesadaran gender dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan menjadi sangat penting untuk menciptakan ekosistem politik yang inklusif dan berkeadilan gender.

Sebagai catatan, penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu menjadi perhatian. Studi ini menggunakan metode studi pustaka sehingga bergantung pada kualitas dan ketersediaan literatur yang ada. Selain itu, analisis ini bersifat deskriptif dan tidak didukung data primer lapangan yang dapat memberikan gambaran empiris lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris dan kuantitatif maupun kualitatif secara langsung di lapangan sangat diperlukan untuk memperkaya pemahaman mengenai dinamika representasi perempuan dalam politik lokal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisy, N. N. N. R., & Aisy, A. R. (2023). Analisis faktor hambatan perempuan dalam menduduki jabatan struktural. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 6(1), 72. <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i1.72-81>
- Arti, N. D. B., & Rizky, R. Y. (2023). Analisis korupsi dan upaya mewujudkan good governance di Indonesia. *Deleted Journal*, 15(2), 135. <https://doi.org/10.33701/jiaped.v15i2.3798>
- Asmorojati, A. W., & Muhammadi, F. (2021). Law, politics, and women: How were 'Aisyiyah's cadres involved in the party? *Varia Justicia*, 17(1), 19. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v17i1.4573>

- Boell, S. K., & Cecez-Kecmanovic, D. (2015). A hermeneutic approach for conducting literature reviews and literature searches. *Communications of the Association for Information Systems*, 37(1), 257-290. <https://doi.org/10.17705/1CAIS.03712>
- Boro, V. I. A., & Kale, A. E. T. (2020). Keterwakilan perempuan di ranah lokal: Studi kasus di Kecamatan Boawae, Nusa Tenggara Timur dalam Pemilu Legislatif 2014. *Deleted Journal*, 11(1), 115. <https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.115-130>
- Celis, K., et al. (2008). Rethinking women's substantive representation. *Representation*, 44(2), 99-110. <https://doi.org/10.1080/00344890802050794>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. *Journal of Advanced Nursing*, 62(1), 107-115. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x>
- Fitriani, M. (2025). Social capital and female political leadership in rural Indonesia. *Asian Journal of Political Sociology*, 7(1), 9-27.
- Franceschet, S., & Piscopo, J. M. (2008). Gender quotas and women's substantive representation: Lessons from Argentina. *Politics & Gender*, 4(3), 393-425. <https://doi.org/10.1017/S1743923X09090340>
- Haq, M. I., & Afad, M. N. (2022). Gender justice actualization through gender islamic school. *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 15(2), 83. <https://doi.org/10.35905/al-maiyyah.v15i2.752>
- Joy, O. I., et al. (2021). Factors that militate against women participation in politics in Enugu State. *Open Political Science*, 4(1), 68. <https://doi.org/10.1515/openps-2021-0008>
- Khoirurrohman, M., et al. (2024). Mitigasi bencana dalam perspektif kebijakan publik di Kota Malang. *Jurnal Administrasi Publik, Manajemen Pembangunan Dan Pemerintahan*, 1(2), 67. <https://doi.org/10.62085/jadment.v1i2.11>
- Krook, M. L. (2009). *Quotas for women in politics: Gender and candidate selection reform worldwide*. Oxford University Press.
- Krook, M. L. (2010). Why are fewer women than men elected? Gender and the dynamics of candidate selection. *Political Research Quarterly*, 63(2), 302-321. <https://doi.org/10.1177/1065912908330292>
- Kurniawan, B. (2020). *Demokrasi lokal dan representasi politik: Studi atas peran perempuan di DPRD Kabupaten*. Penerbit Humaniora.
- Lakburlawal, M. A., et al. (2021). Women in the customary village government system: From customary law to human rights in Maluku, Indonesia. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, 4(2), 82. <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2021.v04i02.008>
- Lestari, D., & Handayani, S. (2023). Strategi politik perempuan di DPRD: Studi komparatif Sleman dan Banyuwangi. *Jurnal Politik Gender*, 8(2), 112-129.
- Maharani, A. (2021). Transformasi peran gender dalam politik lokal pasca-reformasi. *Jurnal Sosial Politik*, 18(1), 55-70.
- Mahsun, M., et al. (2021). Female candidates, Islamic women's organisations, and clientelism in the 2019 Indonesian elections. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 73. <https://doi.org/10.1177/1868103420988729>
- Nastia, N., et al. (2022). Empowerment of PKK mothers through entrepreneurial skills education training. *Community Empowerment*, 7(2), 393. <https://doi.org/10.31603/ce.6065>
- Ningsih, R., & Setiawan, H. (2024). Transformative leadership of women in local governance. *Indonesian Journal of Public Policy and Governance*, 12(1), 22-35.

- Putri, R., & Santoso, B. (2022). Evaluasi kuota perempuan dalam pemilu 2019: Antara representasi dan simbolisme. *Jurnal Demokrasi Dan Pemilu*, 12(1), 87-102.
- Rahmawati, R., & Nurcahyani, N. (2024). Analisis pajak digital di Indonesia: Kontribusi dan tantangan ke depan. *Jurnal Financia*, 5(2), 81. <https://doi.org/10.51977/financia.v5i2.1785>
- Sandika, I., et al. (2024). Analisis sistem pemerintah desa di Indonesia. *Deleted Journal*, 1(1), 212. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.89>
- Saputri, R., & Gusti, E. (2024). Under the shadow of patriarchy: Women position in minangkabau matrilineal system. *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, 9(2), 393. <https://doi.org/10.29240/ajis.v9i2.10149>
- UN Women Indonesia. (2021). *Gender equality and political participation in Indonesia: Progress and challenges*. UN Women Report.
- Wahidah, S., & Nurdin, M. (2023). *Perempuan dan politik lokal: Realitas, tantangan, dan strategi*. Remaja Rosdakarya.
- Webster, J., & Watson, R. T. (2022). Analyzing the past to prepare for the future: Writing a literature review. *MIS Quarterly*, 26(2), xiii-xxiii. <https://doi.org/10.2307/4132319>
- Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods* (5th ed.). SAGE Publications.
- Yuliani, N. (2024). Kebijakan responsif gender dan keterwakilan perempuan di parlemen lokal. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 14(2), 149-163.